

MODEL POLITIK ISLAM KULTURAL PADA ERA WALISONGO DALAM PEMBENTUKAN PERADABAN ISLAM NUSANTARA

Siti Mutomima¹, Machil Latul Chasanah², Amiruloh Amin³, Anang Sholikhuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: mimawahyu292@gmail.com¹, mahilatulchasanah@gmail.com²,
nimaahmad05@gmail.com³, anangsolekhudin@gmail.com⁴

Abstract

Keywords:

Peradaban Islam; Nusantara;
Pendidikan Islam; Pra-
Kemerdekaan; Lembaga
Pendidikan Tradisional

This study examines the development of Islamic civilization in the Indonesian archipelago during the pre-independence period and its influence on the Islamic education system. Islamic civilization, which entered the Indonesian archipelago in the 7th century AD through trade routes, da'wah, and social interaction, developed peacefully by integrating Islamic values into local culture through a process of acculturation. This process gave birth to Islamic kingdoms such as Samudera Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Banten, and Islamic Mataram, as well as traditional institutions such as Islamic boarding schools (pesantren) in Java, surau (prayer houses) in Minangkabau, and dayah (Islamic boarding schools) in Aceh. The method used is qualitative research through library research with a historical-descriptive approach and triangulation of sources from various scientific journals and primary historical sources. The results of the study indicate that traditional Islamic educational institutions function not only as centers of religious learning, but also as a medium for the formation of moral character, social cohesion, and national awareness that would later become the foundation of the Indonesian independence struggle. Islamic civilization has been proven to make a significant contribution to the formation of the intellectual and social identity of pre-independence Indonesian society.

Abstrak

Kata Kunci :

peradaban Islam;
Nusantara; Walisongo;
politik Islam kultural;
Islamisasi; relasi ulama-
penguasa

Kajian tentang era Walisongo selama ini didominasi fokus pada strategi dakwah dan akulturasi budaya, sehingga terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam memahami hubungan sistematis antara pembangunan peradaban Islam dan karakteristik politiknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis model politik yang dikembangkan Walisongo dalam membentuk peradaban Islam Nusantara, dengan penekanan pada mekanisme relasi ulama-penguasa, transformasi politik dari sistem Hindu-Buddha menuju Islam, serta integrasi kultural-politik yang melahirkan identitas Islam Nusantara yang khas. Dengan menggunakan metode historis kualitatif melalui studi

literatur sistematis terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa Walisongo membangun model politik berbasis budaya yang dicirikan oleh tiga karakter inti: legitimasi akomodatif, tata kelola adaptif, dan otoritas sosio-politik integratif. Model ini tidak sekadar strategi keagamaan, melainkan sebuah arsitektur politik yang memungkinkan Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya mengonsolidasikan kekuasaan tanpa kekerasan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang memadukan teori peradaban Islam Ibn Khaldun, teori Islamisasi Nusantara, dan teori politik Islam untuk menjelaskan model politik Walisongo sebagai sistem yang koheren—berbeda dari penelitian sebelumnya yang mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah. Penelitian ini berkontribusi pada historiografi pemikiran politik Islam di Asia Tenggara dan memberikan implikasi teoritis bagi pemahaman Islam moderat sebagai warisan politik.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban Islam Nusantara merupakan salah satu fenomena sejarah paling signifikan di Asia Tenggara, yang tidak hanya mencakup dimensi keagamaan tetapi juga meliputi transformasi sosial, budaya, dan politik secara menyeluruh. Proses Islamisasi di wilayah Nusantara berlangsung melalui dinamika panjang yang melibatkan interaksi antara pedagang Muslim, ulama, penguasa lokal, dan masyarakat dengan latar belakang kepercayaan animisme, dinamisme, serta Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat (Azra, 2004; Ricklefs, 2008). Dalam rentang sejarah ini, peran Walisongo menjadi titik krusial, khususnya dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa yang kemudian memberikan pengaruh formativo terhadap kawasan Nusantara secara lebih luas.

Kajian mengenai Walisongo telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dan peneliti. Ricklefs (2008) dalam karyanya *A History of Modern Indonesia* menyoroti bahwa Islamisasi Jawa berlangsung melalui proses akulturasi yang sangat gradual. Lombard (2005) dalam *Le Carrefour Javanais* menunjukkan bagaimana Jawa menjadi titik persilangan peradaban yang menghasilkan sintesis budaya unik antara Islam, Hindu-Buddha, dan tradisi lokal. Azra (2004) dalam *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia* menekankan peran jaringan ulama transnasional dalam membentuk Islam Nusantara. Sunyoto (2012) melalui *Atlas Wali Songo* memberikan rekonstruksi historis yang komprehensif tentang peran kesembilan wali sebagai agen transformasi sosial. Di tingkat kajian yang lebih spesifik, Syalafiyah dan Harianto (2020) menjelaskan keberhasilan dakwah Walisongo melalui strategi budaya, sementara Anjani (2024) menganalisis pengaruh perdagangan dalam proses Islamisasi, dan Audia et al. (2025) menyoroti kontribusi Walisongo dalam perkembangan sosial-budaya-politik Islam Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut mengandung kesenjangan yang signifikan. Pertama, kajian yang ada cenderung memisahkan dimensi dakwah-kultural dari dimensi politik, sehingga belum menghasilkan pemahaman tentang model politik Walisongo sebagai suatu sistem yang koheren. Kedua, mekanisme konkret relasi ulama-penguasa dalam konteks pembangunan negara Islam (state-building) belum dianalisis secara kritis dengan landasan teori politik Islam yang memadai. Ketiga, perbandingan sistematis antara sistem politik Hindu-Buddha dan Islam pada era Walisongo belum dilakukan dengan kerangka analisis yang terstruktur.

Keempat, penelitian yang ada belum mengintegrasikan teori peradaban Ibn Khaldun (*'asabiyyah* dan siklus peradaban) untuk menjelaskan dinamika politik Walisongo.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengisi gap tersebut dengan mengajukan dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana model peradaban Islam yang dibangun Walisongo di Nusantara, dan (2) bagaimana karakteristik dan mekanisme politik Islam yang berkembang pada era tersebut. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis terpadu yang memadukan teori peradaban, teori Islamisasi, dan teori politik Islam untuk memahami era Walisongo secara holistic sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang hubungan Islam, budaya, dan politik dalam konteks Indonesia kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peradaban Islam: Ibn Khaldun dan Konsep 'Asabiyyah

Untuk memahami peradaban Islam Nusantara, kerangka teoritis Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjadi fondasi konseptual yang relevan. Ibn Khaldun (1958) mengemukakan konsep *'asabiyyah* (solidaritas sosial-politik) sebagai basis pembangunan peradaban dan kekuasaan. Dalam pandangannya, peradaban berkembang ketika suatu kelompok memiliki kohesi internal yang kuat, yang kemudian menjadi landasan bagi pembentukan negara dan kebudayaan. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana Walisongo membangun *'asabiyyah* berbasis Islam sebagai pengganti solidaritas berbasis kasta Hindu-Buddha, sehingga menciptakan basis legitimasi baru bagi kekuasaan politik (Baali, 1988; Irwin, 2018).

B. Teori Islamisasi Nusantara

Terdapat beberapa teori utama mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat yang dikemukakan oleh Pijnappel dan Snouck Hurgronje menyatakan Islam masuk melalui pedagang dari Gujarat, India (Azra, 2004). Teori Arab yang didukung oleh Van Leur dan Hamka menekankan peran langsung pedagang Arab dan ulama dari Hadramaut (Abdullah, 1991). Teori Persia dikemukakan Hoesein Djajadiningrat berdasarkan kesamaan tradisi keagamaan. Ricklefs (2008) dan Lombard (2005) kemudian mengembangkan perspektif sintesis yang menekankan bahwa Islamisasi Nusantara adalah proses multisumber yang berlangsung secara bertahap dan selektif. Dalam konteks ini, Walisongo berperan sebagai aktor lokal yang mengontekstualisasikan Islam dari berbagai sumber tersebut ke dalam realitas Nusantara (Sunnyoto, 2012).

C. Teori Politik Islam: Relasi Ulama dan Kekuasaan

Teori politik Islam klasik membedakan antara *khilafah* (kekhilafahan universal) dan *imamah* (kepemimpinan regional) sebagai dua model pemerintahan Islam (Al-Mawardi, 1996). Dalam konteks Nusantara, tidak terbentuk sistem khilafah, melainkan model *sultanate* yang menggabungkan legitimasi Islam dengan tradisi kerajaan lokal. Anderson (1990) dalam analisisnya tentang kekuasaan Jawa menunjukkan bahwa legitimasi pemimpin Jawa bersumber dari konsep kesaktian dan keharmonisan kosmis. Walisongo secara cerdas mengintegrasikan konsep legitimasi

Islam berupa *karamah* (karisma spiritual) dan peran sebagai wakil ulama ke dalam kerangka legitimasi Jawa yang sudah ada (Lombard, 2005; Woodward, 1989).

D. Teori Akulturasi Budaya

Konsep akulturasi budaya merujuk pada proses perpaduan antara dua sistem budaya yang menghasilkan bentuk baru tanpa menghilangkan unsur-unsur aslinya (Redfield, Linton, & Herskovits, 1936). Dalam konteks Walisongo, proses akulturasi ini bersifat selektif dan strategis: elemen budaya lokal yang tidak bertentangan secara fundamental dengan akidah Islam dipertahankan dan diisi dengan makna Islam baru sebuah pendekatan yang oleh Woodward (1989) disebut sebagai *Islamization of Javanese culture* melalui mekanisme *re-semanticization*. Proses ini berbeda dari asimilasi (penghapusan budaya lokal) maupun segregasi (pemisahan total), karena menghasilkan sintesis yang organik (Geertz, 1960).

E. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Penelitian Syalafiyah dan Harianto (2020) menjelaskan strategi dakwah Walisongo yang berbasis budaya namun tidak menganalisis implikasi politiknya secara mendalam. Anjani (2024) menyoroti peran perdagangan dalam Islamisasi tetapi mengabaikan dimensi kelembagaan politik. Audia et al. (2025) memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi Walisongo namun tanpa kerangka teori politik yang sistematis. Hatmansyah (n.d.) mengkaji strategi dakwah dari perspektif komunikasi Islam. Penelitian yang lebih otoritatif dari Azra (2004), Ricklefs (2008), Lombard (2005), dan Sunyoto (2012) memberikan basis historis yang kuat namun masing-masing memiliki fokus spesifik yang tidak secara langsung menganalisis model politik Walisongo sebagai sistem koheren. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan berbagai kerangka teoritis untuk menghasilkan analisis model politik Walisongo yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis kualitatif dalam kerangka studi kepustakaan sistematis (*systematic literature review*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat objek penelitian yang merupakan peristiwa historis dengan rentang waktu abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, di mana data primer bersifat tekstual dan artefaktual.

Tahapan Penelitian

Penelitian mengikuti empat tahapan metodologi sejarah klasik sebagaimana dikemukakan oleh Gottschalk (1986):

1. Heuristik Pengumpulan sumber data dilakukan secara sistematis dengan dua kategori:
2. *Sumber primer*: Babad Tanah Jawi, Serat Centhini, catatan kronik Portugis (*Suma Oriental* karya Tomé Pires, 1515), catatan Ma Huan (*Ying-Yai Sheng-Lan*, 1416), prasasti dan inskripsi pada bangunan bersejarah (Masjid Agung Demak, Makam Sunan Giri, Makam Sunan Ampel), serta naskah-naskah pesantren klasik.

3. *Sumber sekunder*: Karya akademik dari sejarawan otoritatif (Ricklefs, Lombard, Azra, Sunyoto, Abdullah, Woodward, Geertz) serta jurnal ilmiah internasional dan nasional terindeks (Scopus, SINTA) yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2025).
4. Kritik Sumber Validasi dilakukan melalui dua jenis kritik:
5. *Kritik eksternal*: Verifikasi keaslian dan konteks produksi sumber (waktu penulisan, penulis, kondisi historis).
6. *Kritik internal*: Penilaian kredibilitas dan konsistensi isi sumber dengan membandingkan informasi lintas sumber (*cross-referencing*).
7. Interpretasi Data yang telah divalidasi diinterpretasi menggunakan kerangka teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka: teori *'asabiyyah* Ibn Khaldun, teori Islamisasi Nusantara, dan teori politik Islam relasi ulama-penguasa.
8. Historiografi Penyusunan narasi historis-analitis yang tidak sekadar deskriptif, melainkan menghasilkan interpretasi kritis tentang model politik Walisongo.

Teknik Analisis Data

Analisis menggunakan content analysis (Krippendorff, 2004) dengan langkah-langkah: (a) unitisasi data berdasarkan tema (dakwah, politik, akulturasi, kekuasaan), (b) kategorisasi data ke dalam sub-tema, (c) inferensi makna berdasarkan konteks historis, dan (d) validasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan minimal tiga sumber independen untuk setiap klaim historis yang diajukan.

Kriteria Pemilihan Data

Data dipilih berdasarkan kriteria: (a) relevansi dengan fokus penelitian (Walisongo, peradaban Islam, politik Islam Nusantara), (b) kredibilitas sumber (karya akademik terpeer-review, sumber primer historis), (c) kontekstualisasi (sumber yang memberikan informasi spesifik tentang era Walisongo abad 15–16 M), dan (d) komplementaritas (sumber yang saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman komprehensif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peradaban Islam Era Walisongo: Kondisi Pra-Islam sebagai Titik Tolak

Untuk memahami peradaban Islam era Walisongo, perlu dipahami terlebih dahulu konteks sosio-religius yang menjadi landasannya. Sebelum Islam masuk secara masif pada abad ke-15, masyarakat Nusantara khususnya Jawa hidup dalam sistem kepercayaan animisme-dinamisme yang telah berpadu dengan kosmologi Hindu-Buddha selama berabad-abad (Geertz, 1960). Sistem kasta Hindu (Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra) memberikan struktur hierarki sosial yang rigid, di mana legitimasi kekuasaan raja bersumber dari konsep *dewa-raja* (*devaraja*) raja sebagai penjelmaan atau wakil dewa di bumi (Lombard, 2005).

Sistem ini memiliki implikasi politik yang mendalam: kekuasaan bersifat sakral dan absolut, berlapis dengan ritual keagamaan Hindu-Buddha yang eksklusif. Ricklefs (2008) mencatat bahwa pada era Majapahit (abad 13–15 M), legitimasi

kekuasaan sangat bergantung pada kemampuan raja mempertahankan *wahyu* kosmis dan melaksanakan ritual keagamaan yang benar. Struktur ini menciptakan jarak sosial yang besar antara kelas penguasa-brahmana dengan rakyat kebanyakan.

Ketika Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dengan pedagang Arab, Gujarat, dan Persia sejak abad ke-12 M, ia menawarkan alternatif teologis dan sosial yang fundamental: konsep *tauhid* (keesaan Tuhan) yang menolak sistem pantheon Hindu-Buddha, prinsip *ummah* (komunitas Muslim) yang melampaui batas kasta, serta ajaran tentang kesetaraan di hadapan Tuhan (Azra, 2004). Daya tarik sosiologis ini bukan semata-mata argumen teologis menjadi salah satu faktor mengapa Islam berkembang pesat di kalangan masyarakat bawah dan pedagang, sebelum kemudian menembus lapisan penguasa.

B. Strategi Dakwah Walisongo: Mekanisme dan Bukti Historis

Walisongo yang aktif secara kolektif pada rentang abad ke-15 hingga awal abad ke-16 mengembangkan strategi dakwah multidimensi yang tidak dapat dipahami hanya sebagai "pendekatan budaya" secara generik. Masing-masing wali memiliki spesialisasi dan wilayah pengaruh yang berbeda, membentuk jaringan dakwah yang saling melengkapi (Sunnyoto, 2012).

Pendekatan Kultural melalui Re-semantisasi Budaya

Sunan Kalijaga (Raden Said) mengembangkan strategi yang oleh Woodward (1989) disebut *re-semanticization*: mengambil bentuk-bentuk budaya lokal yang sudah ada (wayang, gamelan, tembang) dan mengisinya dengan konten teologis Islam. Contoh konkretnya: lakon wayang *Dewa Ruci* yang semula berisi narasi Hindu-Jawa tentang pencarian kesempurnaan dimodifikasi untuk menyampaikan konsep *tauhid* dan perjalanan spiritual dalam Islam. Dalam praktik ini, bentuk (*form*) dipertahankan tetapi makna (*meaning*) ditransformasi sebuah strategi yang meminimalkan resistensi kultural. Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim) menggunakan instrumen gamelan *bonang* dalam ritual keagamaan dan mengadaptasi tembang Jawa untuk syair-syair bermuatan Islam. Tembang *Tombo Ati* yang masih populer hingga kini merupakan warisan langsung strategi ini sebuah karya yang secara struktural mengikuti konvensi sastra Jawa tetapi berisi ajaran tasawuf Islam (Hatmansyah, n.d.).

Pendekatan Institusional melalui Pesantren

Sunan Ampel (Raden Rahmat) mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi institusi pendidikan Islam pertama yang sistematis di Jawa. Secara institusional, pesantren Ampel bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat jaringan sosial dan politik: dari sinilah para santri yang kemudian menjadi pemimpin lokal, pedagang berpengaruh, dan bahkan penguasa kerajaan Islam berasal (Dhofier, 1982). Sunan Giri (Raden Ainul Yaqin) mengembangkan model serupa di Giri Kedaton, yang oleh Lombard (2005) digambarkan sebagai *quasi-state* karena memiliki otoritas keagamaan yang melampaui batas-batas kerajaan.

Pendekatan Sosio-Ekonomi

Aspek yang sering diabaikan dalam kajian dakwah Walisongo adalah dimensi ekonomi. Sunan Drajat (Raden Qosim) terkenal dengan program pemberdayaan

ekonomi masyarakat miskin membangun sistem solidaritas sosial berbasis zakat dan wakaf. Ini adalah contoh dakwah bil-hal (dakwah melalui tindakan nyata) yang menciptakan loyalitas berbasis manfaat konkret, bukan sekadar konversi teologis. Pelabuhan Demak-Jepara yang berkembang pada era ini juga memberikan basis ekonomi bagi ekspansi kekuasaan Islam Demak, menggantikan hegemoni ekonomi Majapahit yang berbasis pedalaman (Ricklefs, 2008).

C. Karakteristik Politik Islam Era Walisongo: Analisis Sistematis

Berbeda dari sistem politik Hindu-Buddha yang mendasarkan legitimasi pada konsep *devaraja* dan genealogi kosmis, model politik yang dikembangkan Walisongo membangun legitimasi melalui mekanisme yang berbeda secara fundamental. Terdapat tiga karakteristik utama yang dapat diidentifikasi:

1. Legitimasi Akomodatif: Dari *Devaraja* ke *Wali Allah*

Transformasi legitimasi politik pada era Walisongo tidak bersifat revolusioner (menghapus sistem lama secara total) melainkan substitutif-transformatif: konsep *devaraja* (raja sebagai dewa) digantikan dengan konsep raja sebagai pemimpin Muslim yang mendapat legitimasi dari ulama sebagai wakil otoritas agama. Dalam konteks Kesultanan Demak, Raden Patah (Sultan pertama Demak, 1475–1518) tidak mengklaim dirinya sebagai dewa, tetapi sebagai pemimpin umat Islam yang legitimasinya dikukuhkan oleh Walisongo khususnya Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga (Sunnyoto, 2012). Mekanisme legitimasi ini bekerja melalui beberapa cara: (a) penguasa memberikan dukungan material dan politik kepada wali, (b) wali memberikan *karamah* (karisma spiritual) dan *fatwa* keagamaan yang mengukuhkan kekuasaan penguasa, dan (c) masyarakat yang menghormati wali secara otomatis memberikan loyalitas kepada penguasa yang didukung wali. Model ini secara struktural mirip dengan sistem *caesaropapism* di Eropa abad pertengahan, namun dengan perbedaan penting: wali memiliki otonomi dan otoritas yang tidak sepenuhnya subordinat terhadap sultan (Woodward, 1989). Perbandingan dengan sistem Hindu-Buddha: dalam sistem Majapahit, legitimasi keagamaan (Brahmana) sepenuhnya melayani kepentingan kekuasaan kerajaan (*Ksatria*)—Brahmana tidak memiliki otoritas politik independen. Sebaliknya, dalam sistem Walisongo, ulama (wali) memiliki otoritas moral yang dapat mengkritisi penguasa, sebagaimana tercermin dalam peran Sunan Kudus dalam konflik suksesi Demak pasca-Sultan Trenggana (Ricklefs, 2008).

2. Tata Kelola Adaptif: Hukum Adat sebagai Jembatan Syariat

Karakteristik kedua adalah adaptivitas dalam tata kelola: Walisongo tidak memaksakan implementasi syariat secara kaffah (menyeluruh dan serentak), melainkan melalui proses graduasi yang mengintegrasikan hukum adat (*adat*) dan syariat Islam secara bertahap. Ini mencerminkan prinsip fiqhiyah *la yukallaf illa bi al-wus'i* (seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya). Contoh konkret: institusi *slametan* (selamatan) yang merupakan ritual Jawa pra-Islam dipertahankan dalam bentuk, tetapi kontennya diubah: doa-doa animistis digantikan dengan *tahlil* (dzikir Islam), sesaji ritual digantikan dengan makanan yang dimakan bersama. Institusi *sekaten* (perayaan Maulid Nabi) dikembangkan dari tradisi perayaan Hindu dengan menggantinya secara bertahap dengan konten Islam, menggunakan gamelan sebagai media menarik massa (Geertz, 1960; Sunnyoto, 2012). Dalam konteks hukum,

Abdullah (1991) mencatat bahwa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara pada era ini mengembangkan sistem hukum yang merupakan sintesis antara hukum adat, hukum Hindu, dan prinsip-prinsip syariat—bukan penerapan syariat murni. Ini adalah strategi politik yang cerdas: mengubah sistem hukum secara radikal akan menimbulkan resistensi masif, sementara sintesis gradual menciptakan penerimaan organik.

3. Otoritas Integratif: Jaringan Ulama sebagai Infrastruktur Politik

Karakteristik ketiga adalah sifat integratif dari otoritas Walisongo yang melampaui batas geografis dan kelas sosial. Berbeda dari otoritas Brahmana dalam sistem Hindu yang terbatas pada fungsi ritual dan eksklusif terhadap kasta tertentu, otoritas wali bersifat inklusif dan multifungsional: sebagai pendidik, hakim adat, penasihat politik, pemimpin spiritual, dan mediator sosial sekaligus.

Jaringan Walisongo yang menghubungkan Ampel Denta, Giri Kedaton, Kalijaga, Kudus, Muria, Drajat, Bonang, Kalijaga, dan Banten membentuk infrastruktur politik informal yang melampaui otoritas formal kerajaan. Ketika Majapahit runtuh (c. 1527), jaringan ini berfungsi sebagai *safety net* sosial-politik yang memungkinkan transisi kekuasaan berlangsung tanpa disintegrasi sosial yang masif (Lombard, 2005). Dalam kerangka Ibn Khaldun (1958), jaringan ini adalah manifestasi *'asabiyyah* berbasis agama yang menjadi basis pembangunan peradaban baru.

D. Peran Walisongo dalam Struktur Kekuasaan Demak: Studi Kasus

Kesultanan Demak (berdiri c. 1475–1568) merupakan laboratorium terbaik untuk mengamati model politik Walisongo dalam praktik. Demak didirikan oleh Raden Patah dengan dukungan aktif Walisongo, khususnya Sunan Ampel yang memberikan legitimasi keagamaan dan Sunan Kalijaga yang berperan dalam aspek kultural-diplomatik (Sunyoto, 2012).

Struktur kekuasaan Demak menunjukkan tiga lapisan:

Lapisan	Aktor	Fungsi
Kekuasaan Formal	Sultan dan Adipati	Pemerintahan, militer, fiskal
Otoritas Keagamaan	Walisongo dan ulama	Legitimasi, hukum, pendidikan
Basis Sosial	Pesantren dan santri	Jaringan loyalitas, mobilisasi

Interaksi antara tiga lapisan ini menciptakan sistem politik yang resilient: ketika terjadi krisis suksesi (seperti setelah wafatnya Sultan Trenggana pada 1546), otoritas ulama berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang mencegah konflik berkembang menjadi perang saudara yang destruktif. Sunan Kudus, misalnya, memainkan peran kunci dalam negosiasi antara faksi-faksi yang bersaing (Ricklefs, 2008).

Perbandingan dengan sistem Majapahit menunjukkan perbedaan yang signifikan: dalam Majapahit, krisis suksesi hampir selalu berakhir dengan perang saudara (*paregreg*) karena tidak ada mekanisme mediasi otoritatif di luar istana. Sistem Walisongo menciptakan mekanisme mediasi eksternal yang berbasis otoritas moral, bukan kekuatan militer.

E. Dampak Peradaban Islam terhadap Kehidupan Politik dan Sosial

Transformasi sosio-politik yang dihasilkan era Walisongo dapat dianalisis dalam beberapa dimensi:

Transformasi Sistem Nilai: Prinsip tauhid secara logis menolak sistem kasta, karena semua manusia setara di hadapan Allah. Dalam praktik, ini tidak serta-merta menghapus hierarki sosial, tetapi mengubah basis hierarkinya: dari genealogi kosmis (keturunan dewa) menjadi kombinasi antara keturunan biologis, *ilmu* (pengetahuan agama), dan *karamah* (karisma spiritual). Pergeseran ini membuka ruang mobilitas sosial yang lebih besar, di mana seorang putra petani dapat menjadi ulama berpengaruh melalui jalur pendidikan pesantren (Dhofier, 1982).

Kelembagaan Islam sebagai Infrastruktur Sosial: Munculnya masjid, pesantren, dan lembaga *qadhi* (hakim syariat) sebagai institusi publik menciptakan infrastruktur sosial baru yang tidak bergantung pada negara. Institusi-institusi ini menjadi basis civil society berbasis Islam yang mampu bertahan meskipun kekuasaan politik berubah sebagaimana terbukti ketika Demak runtuh, jaringan pesantren tetap berfungsi sebagai pengikat sosial masyarakat (Azra, 2004).

Lahirnya Identitas Islam Nusantara: Sintesis antara Islam dan budaya lokal melahirkan identitas religius yang khas *Islam Nusantara* atau yang oleh Geertz (1960) disebut *Javanese Islam*. Identitas ini ditandai oleh penekanan pada dimensi sufistik, toleransi terhadap praktik lokal yang tidak bertentangan dengan akidah inti, dan orientasi komunitarian. Identitas ini kemudian menjadi fondasi bagi Islam moderat Indonesia yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di era modern (Ricklefs, 2012).

F. Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Relevansi Kontemporer

Kelebihan model politik Walisongo terletak pada kemampuannya menghasilkan Islamisasi tanpa koersi dan akulturasi tanpa disrupsi yang destruktif. Dalam perspektif Ibn Khaldun, model ini berhasil membangun *'asabiyyah* baru berbasis Islam yang cukup kuat untuk mendirikan peradaban, tetapi cukup fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman. Tingkat keberhasilan ini sangat luar biasa jika dibandingkan dengan proses Islamisasi di wilayah lain (Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah) yang umumnya melibatkan komponen kekerasan yang lebih besar (Esposito, 2011).

Keterbatasan model ini terletak pada absennya formalisasi hukum dan kelembagaan. Karena bergantung pada otoritas personal wali dan hubungan informal ulama-penguasa, sistem ini rentan terhadap guncangan ketika tokoh-tokoh kunci meninggal dunia. Pasca-Walisongo, tanpa figur-figur dengan karisma spiritual yang setara, kohesi antara ulama dan penguasa melemah membuka jalan bagi konflik yang lebih besar pada abad ke-17 dan seterusnya (Ricklefs, 2008). Ini adalah "harga" dari model yang berbasis karisma personal dibandingkan institusi formal.

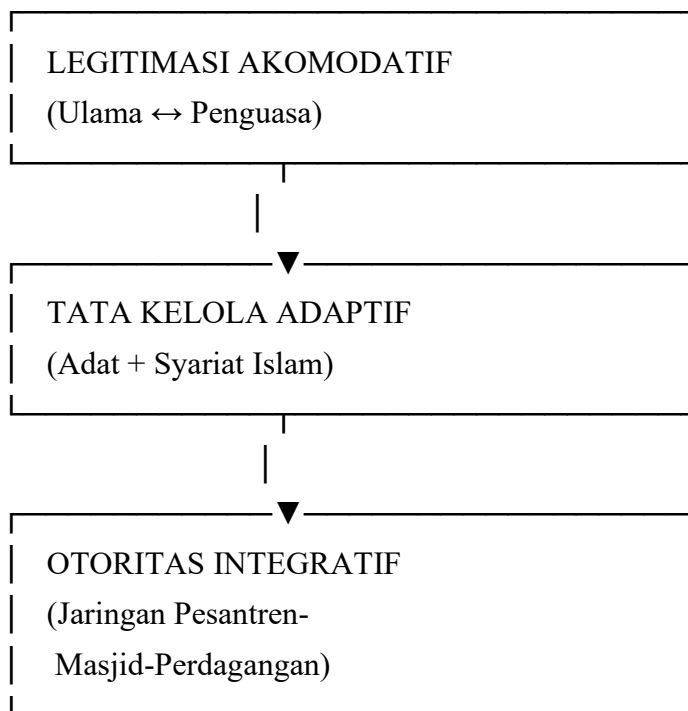
Relevansi kontemporer: Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi (1998–kini), nilai-nilai yang diwariskan Walisongo musyawarah, inklusivitas, toleransi berbasis adat-Islam tetap relevan sebagai referensi normatif. Perdebatan tentang relasi agama dan negara, implementasi hukum Islam, dan pluralisme di Indonesia modern pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pergumulan yang telah dimulai pada era

Walisongo. Model "Islam kultural" yang mereka kembangkan menjadi salah satu argumen historis terkuat bagi pendekatan Islam moderat dalam konteks negara-bangsa Indonesia yang majemuk (Azra, 2004; Ricklefs, 2012).

G. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan bahwa model politik Walisongo merupakan sistem yang secara struktural dapat dijelaskan melalui tiga pilar yang saling menopang:

Model Politik Islam Kultural Walisongo:



Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan peradaban Islam Nusantara yang khas: berbasis konsensus bukan koersi, berbasis budaya bukan eksklusivitas, dan berbasis jaringan bukan hierarki formal yang kaku.

Tabel 1: Perbandingan Sistem Politik Hindu-Buddha dan Islam Era Walisongo

Aspek	Sistem Hindu-Buddha (Majapahit)	Sistem Islam (Era Walisongo)
Basis legitimasi	<i>Devaraja</i> (raja = dewa)	Ulama sebagai legitimator berbasis syariat
Sumber otoritas	Genealogi kosmis + ritual	<i>Karamah</i> , <i>ilmu</i> , dan moral Islam
Hubungan penguasa-agama	Brahmana subordinat terhadap raja	Ulama memiliki otonomi moral

Mobilitas sosial	Sangat terbatas (sistem kasta)	Lebih terbuka melalui jalur pesantren
Mekanisme krisis	Perang saudara (<i>paregreg</i>)	Mediasi ulama
Basis hukum	Hukum Hindu (<i>Manawadharmasastra</i>)	Sintesis adat + prinsip syariat
Integrasi budaya lokal	Absorpsi selektif dalam ritual Hindu	Akulturasi aktif (<i>re-semanticization</i>)

Tabel 2: Pilar Peradaban Islam Era Walisongo

Pilar	Wujud Konkret	Aktor Utama	Dampak Jangka Panjang
Keagamaan	Masjid Agung Demak, Giri Kedaton, lembaga Qadhi	Seluruh Walisongo	Islam menjadi agama negara dan rakyat
Intelektual	Pesantren Ampel, Kitab Suluk, jaringan sanad keilmuan	Sunan Ampel, Sunan Giri	Lahirnya tradisi keilmuan Islam pribumi
Sosio-Ekonomi	Pelabuhan Demak-Jepara, sistem wakaf, solidaritas lumbung	Sunan Drajat, Sunan Ampel	Putusnya hegemoni ekonomi Majapahit
Seni-Budaya	Wayang, gamelan Islam-Jawa, tembang sufistik	Sunan Kalijaga, Sunan Bonang	Islam membumi dalam estetika local
Politik-Kelembagaan	Kesultanan Demak, jaringan ulama-penguasa	Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus	Fondasi politik Islam moderat Indonesia

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang merupakan kontribusi ilmiah terhadap kajian Islam Nusantara:

Pertama, model politik Walisongo bukanlah sekadar "dakwah damai" yang sering digambarkan secara naratif, melainkan merupakan sistem politik yang terstruktur dengan mekanisme kerja yang dapat diidentifikasi secara analitis: legitimasi akomodatif melalui relasi ulama-penguasa, tata kelola adaptif melalui sintesis adat-syariat, dan otoritas integratif melalui jaringan institusional pesantren-masjid-perdagangan. Sistem ini secara fungsional menggantikan sistem legitimasi *devaraja* Hindu-Buddha dengan model yang lebih egalitarian dan berbasis konsensus moral.

Kedua, keberhasilan Walisongo membangun peradaban Islam Nusantara dapat dijelaskan secara teoritis melalui konsep *'asabiyyah* Ibn Khaldun: mereka berhasil membangun solidaritas sosial (*'asabiyyah*) baru berbasis ikatan keagamaan

Islam yang cukup kuat untuk mendirikan politas baru (Demak dan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya), tetapi cukup inklusif untuk mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal. Ini membedakan Islamisasi Nusantara secara fundamental dari proses Islamisasi di kawasan lain yang lebih bersifat koersif.

Ketiga, keterbatasan struktural model ini ketergantungan pada otoritas personal dan absennya formalisasi kelembagaan memberikan implikasi teoretis penting: peradaban yang dibangun atas karisma personal, meskipun efektif dalam jangka pendek dan menengah, memerlukan institusionalisasi untuk menjamin keberlanjutan. Ini relevan tidak hanya untuk sejarah Islam Indonesia tetapi juga untuk kajian perbandingan *state-building* berbasis agama secara lebih luas.

Implikasi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis "model politik Islam kultural" (*cultural Islamic political model*) sebagai kategori analitik yang dapat diterapkan untuk memahami proses Islamisasi di konteks lain di mana Islam harus bernegosiasi dengan tradisi budaya lokal yang kuat. Kerangka ini memperkaya literatur politik Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada model Timur Tengah yang berbeda konteksnya.

Implikasi historis bagi studi sejarah Islam Indonesia: era Walisongo bukan hanya babak awal Islamisasi, tetapi merupakan momen foundational di mana karakter Islam Indonesia moderat, toleran, berbasis budaya local dibentuk secara deliberatif. Pemahaman tentang karakter foundational ini penting untuk memahami mengapa Islam Indonesia berkembang berbeda dari Islam di kawasan lain, dan mengapa moderasi keagamaan memiliki akar sejarah yang dalam di Indonesia.

SARAN

- Bagi akademisi dan peneliti, kajian lanjutan perlu menggunakan perbandingan lintas-regional antara model politik Islam Nusantara dengan model Islamisasi di kawasan lain (Afrika Barat, Asia Tengah, Anatolia) untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang menentukan karakter Islamisasi di suatu kawasan.
- Bagi lembaga pendidikan, nilai-nilai dakwah Walisongo yang moderat, toleran, dan berbasis budaya lokal perlu diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan, bukan hanya pendidikan agama, untuk memperkuat pemahaman tentang akar historis pluralisme Indonesia.
- Bagi masyarakat, pelestarian warisan budaya Islam Nusantara perlu dilakukan melalui pendokumentasian sistematis tradisi-tradisi lokal yang merupakan produk akulturasi era Walisongo, sebelum tergerus oleh homogenisasi budaya global.
- Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, model musyawarah, inklusivitas, dan mediasi berbasis otoritas moral yang dikembangkan Walisongo dapat menjadi referensi dalam merancang mekanisme resolusi konflik sosial-keagamaan di Indonesia kontemporer.
- Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian arkeologi tentang situs-situs peninggalan Walisongo untuk memperoleh data primer yang lebih empiris, serta kajian arsip Portugis dan Tionghoa yang belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber historis era Walisongo.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (1991). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-ahkam al-sultaniyyah: The laws of Islamic governance* (A. Yate, Trans.). London: Ta-Ha Publishers.

Anderson, B. R. O'G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Anjani, S. (2024). Masuknya peradaban Islam ke Indonesia dan peran Walisongo dalam proses Islamisasi Nusantara. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 1(September), 1–18.

Audia, A., Langkat, S. A., Dalimunthe, R., Syahputra, A., & Langkat, S. A. (2025). Peran Walisongo dalam peradaban Islam Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 3(4), 1048–1060.

Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries*. Crows Nest: Allen & Unwin.

Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Bandung: Mizan.

Baali, F. (1988). *Society, state, and urbanism: Ibn Khaldun's sociological thought*. Albany: State University of New York Press.

Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.

Esposito, J. L. (2011). *Islam: The straight path* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.

Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah* (N. Notosusanto, Trans.). Jakarta: UI Press.

Hatmansyah, O. (n.d.). *Strategi dan metode dakwah Walisongo*. Kudus: STAIN Kudus Press.

Ibn Khaldun. (1958). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans., Vol. 1–3). New York: Pantheon Books.

Irwin, R. (2018). *Ibn Khaldun: An intellectual biography*. Princeton: Princeton University Press.

Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang budaya* (Vol. 1–3, W. Utomo et al., Trans.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ma Huan. (1970). *Ying-yai sheng-lan: The overall survey of the ocean's shores [1433]* (J. V. G. Mills, Trans.). Cambridge: Hakluyt Society.

Ogata, S., Irawan, B., Abror, M., Chotib, M. Q. A., & Nuha, U. (2024). Halal standards and certification systems: Adapting to the global era and addressing challenges in Muslim-minority countries. *Journal of Islamic Studies*, 5(2), 1–22.

Pires, T. (1944). *The Suma Oriental of Tomé Pires* (A. Cortesão, Trans.). London: Hakluyt Society.

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum for the study of acculturation. *American Anthropologist*, 38(1), 149–152.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.

Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to the present*. Singapore: NUS Press.

Sunyoto, A. (2012). *Atlas Wali Songo: Buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah*. Depok: Pustaka IIMaN & LTN PBNU.

Syalafiyah, N., & Harianto, B. (2020). Walisongo: Strategi dakwah Islam di Nusantara. *Jurnal Historia Islamica*, 1(2), 167–178.

Woodward, M. R. (1989). *Islam in Java: Normative piety and mysticism in the sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press.